

**PERDEBATAN PARTAI POLITIK TENTANG SISTEM *PRESIDENTIAL*
THRESHOLD PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019
(Suatu Studi Perbedaan Pandangan Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra
Tentang *Presidential Threshold*)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperole Gelar Magister Pendidikan



Oleh :
Putra Kaslin Hutabarat
Nim. 1706556

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG
2019**

**PERDEBATAN PARTAI POLITIK TENTANG SISTEM *PRESIDENTIAL*
THRESHOLD PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019**

**(Suatu Studi Perbedaan Pandangan Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra
Tentang *Presidential Threshold*)**

oleh

PUTRA KASLIN HUTABARAT

Sebuah Tesis yang diajukan untuk memperoleh gelar Magister
Pendidikan Kewarganegaraan

©PUTRA KASLIN HUTABARAT

Universitas Pendidikan Indonesia

2019

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Tesis ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian
dengan dicetak ulang, difotokopi, atau dengan cara lainnya tanpa seizin penulis

HALAMAN PENGESAHAN

PUTRA KASLIN HUTABARAT

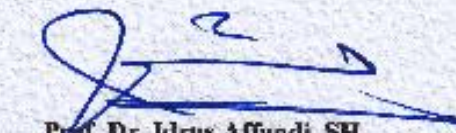
NIM. 1706556

**PERDEBATAN PARTAI POLITIK TENTANG SISTEM *PRESIDENTIAL*
THRESHOLD PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019**

**(Suatu Studi Perbedaan Pandangan Partai PDI-Perjuangan dan Partai
Gerindra Tentang *Presidential Threshold*)**


DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH:

Pembimbing Akademik



Prof. Dr. Idrus Affandi, SH,
NIP. 19540404 198101 1 002

**Mengetahui,
Ketua Departemen Pendidikan Kewarganegaraan
Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia**



Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah, M.Si
NIP. 19620316 198803 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perdebatan antara Partai PDI-Perjuangan selaku partai *simple majority* dari pemerintah yang mengajukan usulan diadakannya ambang batas *presidential threshold* sebesar 20% kursi parlemen dan 25% suara nasional. Sedangkan Partai Gerinda sebagai *simple minority* mengajukan usulan ambang batas sebesar 0%. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan menggunakan desain penelitian studi komparatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Pengambilan Informan diajukan sesuai dengan subjek permasalahan yang terkandung di dalam penelitian ini yaitu, dari pihak DPP Partai PDI-Perjuangan diwakilkan oleh kader DPP PDI Perjuangan sekaligus ketua TKN wilayah Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Ir. Edwrd Tanari, M.Si, sebagai pihak yang pro terhadap PT dan dari pihak DPP Partai Gerindra oleh Bapak Brigjen TNI (Purn) Anwar Ende, S.IP sebagai pihak yang kontra terhadap PT. Selain itu juga informan dari salah satu pakar yaitu Effendi Gazali sekaligus penggugat UU Tentang pengaturan *presidential threshold* dan politisi senior Dr. Ir. H. Akbar Tanjung sebagai tokoh yang berpengalaman dalam melihat perkembangan pemilu di Indonesia. Adapun teknik analisis data yang digunakan dengan cara reduksi data, pengumpulan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa terjadi perbedaan pandangan secara prinsip dan politis tentang diberlakukannya sistem *presidential threshold* dengan diberlakukannya pemilu serentak, sebab syarat ambang batas yang digunakan adalah hasil pemilu sebelumnya.

Kata Kunci : Pemilu, *Presidential Threshold*, Partai politik, Demokrasi, Pemilu Serentak

ABSTRACT

This research is motivated by the debate about the application of the presidential threshold system among political party politicians in the Republic of Indonesia Parliament. Concretely, this study examines political party debates in addressing the implementation of the presidential threshold system in the 2019 presidential election. In this debate, the PDI-Perjuangan Party as a simple majority party from the government is followed by the Golkar Party, Hanura Party, Nasdem Party, PKB and PPP as the coalition that proposed a presidential threshold of 20% of parliamentary seats and 25% of national votes. While the Gerindra, Democrats, PKS and PAN parties proposed a threshold of 0%. This study uses a qualitative descriptive method, and uses a comparative study design. The data collection technique uses observation, interviews, documentation. Informants were submitted according to the subject matter contained in this study, namely, from the DPP PDI-Perjuangan Party represented by PDI Perjuangan DPP cadres as well as chairman of the South Sulawesi TKN region, namely Mr. Ir. Edwrd Tanari, M.Sc, as a party that is pro against the PT and from the Gerindra Party DPP by Mr. TNI Brigadier General Retired Anwar Ende, S.IP as the party who contradicted PT. Besides that, he was also an informant from one of the experts, Effendi Gazali, as well as the plaintiff of the Law concerning the regulation of the presidential threshold and senior politician Dr. Ir. H. Akbar Tanjung as a figure who is experienced in seeing the development of elections in Indonesia. The data analysis techniques used by means of data reduction, data collection and conclusion. The results of this study that there are differences in principle and political views about the enactment of the presidential threshold system with the enactment of simultaneous elections, because the threshold requirements used are the results of previous elections.

Keywords: Election System, Presidential Threshold, Democracy, Concurrent Elections

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR BAGAN	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Umum	7
1.3.2. Tujuan Khusus	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2. Manfaat Praktis	9
1.5. Struktur Organisasi Tesis.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
2.1. Teori Kajian Politik	12
1.2.1. Kajian Politik	12
1.2.2. Teori Perdebatan Politik	13
2.2. Teori Partai Politik	15
2.3. Fungsi Partai Politik	18
2.4. Sistem Pemilu	21
2.4.1. Hakikat Sistem Pemilu	21
2.4.2. Kaitan Pemilu dan Demokrasi	24
2.4.3. Kaitan Kedaulatan Rakyat dan Pemilu	28
2.4.4. Model-model pemilu	31
2.5. Presidential Threshold	37
2.5.1. Pengertian <i>Presidential Threshold</i>	37
2.5.2. Konsep Sistem Presidential Threshold	39
2.5.3. Persentase Ambang Batas Pilpres 2019.....	40
2.6. Penelitian Terdahulu.....	42

BAB III METODE PENELITIAN.....	49
3.1. Pendekatan Penelitian.....	50
3.2. Desain Penelitian	51
3.3. Lokasi dan Subjek Penelitian	51
3.4. Teknik Pengumpulan Data	52
3.5. Teknik Analisis Data	53
3.6. Validitas Data	54
3.7. Kerangka berfikir.....	56
3.8. Jadwal Penelitian	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1. Deskripsi Umum Subjek dan Lokasi Penelitian.....	59
4.1.1. Deskripsi Umum Subjek/Informan Penelitian.....	59
4.2.2. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	60
4.2. Profil Lokasi Penelitian	60
4.2.1 Profil DPP Partai PDI Perjuangan	60
4.2.1.1. Sejarah Partai PDI Perjuangan	60
4.2.1.2. Visi dan Misi Partai PDI Perjuangan.....	61
4.2.1.3. Struktur Kepengurusan Organisasi	63
4.2.1.4 Lambang Partai Politik	65
4.2.2. DPP Partai Gerindra	66
4.2.2.1. Sejarah Partai Gerindra.....	66
4.2.2.2. Visi dan Misi Partai Gerindra.....	67
4.2.2.3. Tugas dan Fungsi Partai Gerindra	68
4.2.2.4. Struktur Kepengurusan Partai Gerindra	69
4.2.2.5. Lambang Partai Gerindra.....	74
4.3. Deskripsi Hasil penelitian.....	75
4.3.1. Perdebatan partai politik terhadap sistem <i>Presidential Threshold</i> pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan diberlakukannya pemilu serentak	75
4.3.1.1. Pandangan dan sikap politik DPP Partai PDI Perjuangan.....	75
4.3.1.2. Pandangan dan sikap politik DPP Partai Gerindra	76
4.3.1.3. Pandangan dan sikap Pakar/Ahli Terkait (Effendi Gazali)	78
4.3.1.4. Sikap dan pandangan politisi senior (Akbar Tanjung)	80
4.3.1.5. Triangulasi Data Informan.....	82

4.3.2. Sikap Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra dalam menyikapi hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian system <i>presidential threshold</i> pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019	84
4.3.2.1. Pandangan dan sikap DPP Partai PDI Perjuangan	84
4.3.2.2. Pandangan dan sikap Partai Gerindra	86
4.3.2.3. Pandangan dan sikap Ahli/pakar terkait (Effendi Gazali)	87
4.3.2.4. Pandangan dan sikap politisi senior (Akbar Tanjung).....	88
4.3.2.5. Triangulasi Data Informan.....	90
4.3.3. Perbedaan pandangan partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra dengan terbatasnya kesempatan partai politik yang tidak memenuhi syarat ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden 2019?.....	93
4.3.3.1. Pandangan dan sikap DPP PDI Perjuangan.....	93
4.3.3.2. Pandangan dan sikap Partai Gerindra	94
4.3.3.3. Pandangan dan sikap Ahli/pakar terkait (Effendi Gazali)	96
4.3.3.4. Pandangan dan sikap politisi senior (Akbar Tanjung).....	97
4.3.3.5. Triangulasi Data Informan.....	99
4.3.4. Mengapa diperlukan sistem <i>Presidential Threshold</i> pada pemilu presiden dan wakil presiden 2019 dalam konteks Multi Partai di Indonesia?	102
4.3.5.1. Pandangan dan sikap DPP PDI Perjuangan.....	102
4.3.5.2. Pandangan dan sikap Partai Gerindra	103
4.3.5.3. Pandangan dan sikap Ahli/pakar terkait (Effendi Gazali)	105
4.3.5.4. Pandangan dan sikap politisi senior (Akbar Tanjung).....	107
4.3.5.5. Triangulasi Data Informan.....	109
4.4. Hasil analisis dan Pembahasan	113
4.4.1. Perdebatan partai politik terhadap sistem <i>Presidential Threshold</i> pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan diberlakukannya pemilu serentak	113
4.4.1.1. Pandangan dan sikap DPP PDI Perjuangan.....	113
4.4.1.2. Pandangan dan sikap Partai Gerindra	119
4.4.1.3. Pandangan dan sikap Ahli/pakar terkait (Effendi Gazali)	121
4.4.1.4. Pandangan dan sikap politisi senior (Akbar Tanjung).....	123

4.4.2. Sikap Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra dalam menyikapi hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian system <i>presidential threshold</i> pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019	126
4.4.2.1. Pandangan dan sikap DPP PDI Perjuangan	126
4.4.2.2. Pandangan dan sikap Partai Gerindra.....	129
4.4.2.3. Pandangan dan sikap Ahli/pakar terkait (Effendi Gazali).....	132
4.4.2.4. Pandangan dan sikap politisi senior (Akbar Tanjung)	135
4.4.3. Perbedaan pandangan partai PDI-Perjuangan dan partai Gerindra dengan terbatasnya kesempatan partai politik yang tidak memenuhi syarat ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden 2019	137
4.4.3.1. Pandangan dan sikap Partai PDI Perjuangan	137
4.4.3.2. Pandangan dan sikap Partai Gerindra.....	140
4.4.3.3. Pandangan dan sikap Ahli/pakar terkait (Effendi Gazali).....	143
4.4.3.4. Pandangan dan sikap politisi senior (Akbar Tanjung)	146
4.4.4. Mengapa diperlukan sistem <i>Presidential Threshold</i> pada pemilu presiden dan wakil presiden 2019 dalam konteks Multi Partai di Indonesia	149
4.4.4.1. Pandangan dan sikap politik DPP PDI Perjuangan	149
4.4.4.2. Pandangan dan sikap Partai Gerindra.....	154
4.4.4.3. Pandangan dan sikap Ahli/pakar terkait (Effendi Gazali).....	157
4.4.4.4. Pandangan dan sikap politisi senior (Akbar Tanjung)	159
BAB V: SIMPULAN DAN REKOMENDASI	163
4.1. Simpulan	163
4.1. Rekomendasi.....	165
DAFTAR PUSTAKA	170

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Data Suara Sah Hasil Pemilu Partai Politik Tahun 2014.....	4
Tabel 2.4.4. Keuntungan dan Kelemahan Sistem Distrik.....	33
Tabel 2.4.4. Tabel Keuntungan dan Kelemahan Sistem Proporsional.....	35
Tabel 2.4.4; Perbedaan Praktek Model Pemilu di Beberapa Negara.....	36
Tabel 2.6: Posisi Penelitian.....	33
Tabel 3.3 : Subjek/Informan Penelitian.....	39
Tabel 3.8 : Jadwal Penelitian.....	44
Tabel 4.2.1.3. Struktur Kepengurusan Organisasi.....	51
Tabel 4.2.2.4. Struktur Kepengurusan Partai Gerindra.....	57
Tabel. 4.3.2.5 Data Triangulasi Informan: Perdebatan partai politik terhadap sistem <i>Presidential Threshold</i> pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan diberlakukannya pemilu serentak.....	83
Tabel 4.3.3.5 Data Triangulasi Informan Sikap Partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra dalam menyikapi hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian system <i>presidential threshold</i> pada pemilu.....	91
Tabel 4.3.4.5 Data Triangulasi Informan Perbedaan pandangan partai PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra dengan terbatasnya kesempatan partai politik yang tidak memenuhi syarat ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden 2019.....	100
Tabel 4.3.5.5 Triangulasi Data Informan Mengapa diperlukan sistem <i>Presidential Threshold</i> pada pemilu presiden dan wakil presiden 2019 dalam konteks Multi Partai di Indonesia.....	110
Tabel 4.4.1.1. Perbedaan konsep aturan <i>presidential threshold</i> di Indonesia dari pemilihan presiden tahun 2014-2019.....	103
Tabel 4.4.4.1. Dimensi Formula Sistem Pemilu Presiden.....	136
Tabel 4.4.4.1 Perbedaan partai yang terlembaga dan tidak terlembaga.....	137

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.4.2. Kaitan partisipasi dan kontrol dalam demokrasi menurut teori Rousseau.....	27
Bagan 2.4.2. Model-Model Demokrasi.....	28
Bagan 2.4.2. Keterkaitan kedaulatan rakyat dan pemilu sebagai salah satu alat untuk mendapat sumber kekuasaan.....	30
Bagan 2.4.4. Model-model sistem pemilu menurut La Parombala (1974).....	32
Bagan 3.6.1 Triangulasi Sumber Data.....	42
Bagan 3.6.2 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	43
Bagan 3.7 Kerangka Berfikir.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Instrumen Penelitian
2. Domentasi Penelitian
3. Matriks hasil penelitian
4. Soal wawancara
5. Hasil wawancara
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Presidential Threshold.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku:

- Abas. (2017). *Legitimasi dan Politik Kebijakan: Teori dan Praktik*. Depok: Alta Utama
- Affandi Idrus (2017). *Bedah Buku Political Education dari Robert Brownhill dan Patricia Smart*. Bandung: Kencana Utama
- Al Muchtar, (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly . 2006 *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Konstitusi Press
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell John.W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Colin Hay. 2007. *Why We Hate Politics?*. Cambridge: Polity Press
- Dewi. S. Fitria. 2017. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Gre Publishing
- Diamond, Larry, 2003, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Edisi Indonesia, Yogyakarta: IRE Press.
- Dhakidae, Daniel. 1999 “Partai-Partai Politik di Indonesia: Kisah Pergerakan dan Organisasi dalam Patahan-Patahan Sejarah,” dalam Tim Penelitian dan Pengembangan (Tim Litbang) Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi, Strategi, dan Program*, Jakarta: Gramedia,
- Edward Aspinall. 2005. *Opposite Soeharto: Compromise, Resistance and Regime Change In Indonesia*. California: Stanford University Press
- Efendi Bachtiar. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina
- Eriyanto. 2012. *Analisis Framing ; Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang
- Fatah, E. S. (1998). *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Pustaka Indonesia
- Fuady, M. (2010). *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gaffar, Janedjri M. 2013. *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press
- Galih R.N Putra (2016). *Politik Pendidikan*. Jakarta: Yayasan Obor Pustaka Indonesia.

- Hans Kelsen. 1973 *General Theory of Law And State*. New York, Russel & Russel
- Haris, S. (2014). *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Harrison (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group
- Herbeth Feith dan Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES, 1988
- Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Ismawati Esti. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra*. Yogyakarta: Ombak
- Isra, Saldi., 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press
- ,..... 2014. *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Grup.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta. Paradima
- Kansil, C. S. T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Koirudin. (2004). *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Kuswanto. (2016). *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*. Malang: Setara Press.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. 2017 *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta:Rajagrafindo Persada
- Lesmana Tjipta. (2013). *Bola Politik dan Politik Bola*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Liddle R. William (2005). *Revolusi Dari Luar: Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Nalar Bekerjasama dengan Freedom Institute.
- Samego Indria. *Jurnal Penelitian Politik: Year Book 2004: Quo Vadis Politik Indonesia*. Jakarta: LIPI Press
- Made Leo Wiratma, Salang. S. dkk (2018). *Panduan Lengkap Pemilu 2019*. Jakarta: Formappi.
- Mainwaring, Scott. 1992. "Presidentialism in Latin Amerika", in *Arend Lijphart (editors). Parliamentary Versus Presidential Government*. Oxford University Press,

- Marijan , Kacung, 2010, *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Kencana, Jakarta
- Meyer Thomas. 2012. *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
- Moury, Catherine. 2013. *Coalition Government and Pary Mandate: How Coalition Agreement Constrain Minesterial Action*. London: Routledge
- Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, 2012
- Nasiwan. 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Ombak
- Natsir, M. (2009). *Alasan yang Melanggar Prinsip Demokrasi, Dalam Kholid O. Santoso (Ed), Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Segarsy.
- Nicole Bolleyer. 2013 *New Parties in Old Party Systems Persistence and Decline in Seventeen Democracies*. Oxford: Oxford University Press
- Nugroho. R. 2004. *Komunikasi Pemerintahan*. Jakarta. Gramedia
- Nurtjahyo, H. (2008). *Filasafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pureklolon, T. P. (2016). *Komunikasi Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Anggota IKAPI
- Rachma, A. 2016. *Hukum Perselisihan Partai Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rauf, Maswardi. 2000. *Memastikan Arah Baru Demokrasi*. Jakarta: LIP Fisip UI dan Mizan
- Robert, A. (2002). *A Theory Of Constitutional Right*. Oxford: Oxford University.
- Surbakti, R. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Grasindo
- Semiawan, C. R. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto Susilo. 2006. *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Periode Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tanjung, Akbar. 2007. *The Golkar Way: Survival Partai Golkar Di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tom Ginsburg. 2003. *Judicial Review In New Democracies, Constitutional Court in Asian Cases*, Cambridge University Press.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian, Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Vicki C. Jackson dan Mark Tushnet. 1999, *Comparative Constitutional Law*. New York: New York Foundation Press

Zuhro, S, R. 2012. *Negara Civil Society dan Demokrasi*. Malang: Instran Publishing

Daftar Jurnal:

- Abdar Yusrijal, 2018. Koalisi Partai Politik Dalam Uu No 10 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. Vol. 1(1) Agustus 2018.
- Adams James, Jay Dow and Samuel Meriill III, 2006. The Political Consequences Of Alienation-Based And Indifferencebased Voter Abstention: Applications To Presidential Elections. *Political Behavior*, Vol. 28, No. 1, March 2006
- Arianto, Bismar. 2011. Perbandingan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Era Reformasi Di Indonesia. *Jurnal FISIP Umrah*. Vol. 2, No. 2, 2011 : 126 - 140
- Armia, M. S. (2016). Penghapusan Presidential Threshhold sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional. *Jurnal Petita*, 135.
- Bolin, Niklas. 2014 New Party Parliamentary Entry in Western Europe, 1960-2010, *European Journal of Government and Economics*, Volume 3 (1)
- Buitenhuis, M. (2014). On Metaphysical Cases against Political Theories. *Erasmus Student Journal of Philosophy*, 4(1), 6–13. Retrieved from <http://hdl.handle.net/1765/77056>
- Damayanti, N. 2015. Gaya Komunikasi Jokowi Pada Debat Politik Pilpres 2014. *Jurnal Ilmiah Komunikasi*. Volume XIV No. 2. Juni 2015, Hlm. 110 - 200
- Dalton, R. J. (2008). The Quantity and The Quality Of Party System: Party System Polarization, It's Measurement, AND It's Concequences. *Sage Publication (Comparative Political Studies)*, 901. Volume 41 Number 7 899-920
- Desmon, Andi. 2018. Relevansi Presidential Threshold Dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat. *Soumatara Law Review*. Volume 1, Nomor 2, 2018
- Diniyanto, A. 2018. Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold Di Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal State Law Review*. Vol. 1 No. 1, Djaelani Aunu Rofiq. (2013). Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Majalah Ilmiah Pawitatan*. Vol: 20, No:1 Maret 2013.
- Effendi, A. (2016). Studi Komparatif Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di indonesia. *Fiat Justisia Journal of Law*, 298.
- Efriza. 2019. Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Dan Sistem Presidensial. *Jurnal Renaissance* | Volume 4 No. 01 | Mei 2019, hlm: 495-503
- Faiz Pan M, 2009. Teori Keadilan Jhon Rawls. *Jurnal Konstitusi*. Volume 6, Nomor 1, April 2009
- Firmanzah, 2008, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Fuqoha (2017). Pengisian Jabatan Presiden Dan *Presidential Threshold* Dalam Demokrasi Konstitusional Di Indonesia. *Jurnal AJUDIKASI* Vol 1 No 2 Desember 2017, 27-38.

- Grundler, K. Krieger, T. (2016). Democracy and growth: Evidence from a machine learning indicator, *European Journal of Political Economy*, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2016.05.005>.
- Hanan, D. (2016). Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian. *Jurnal Universitas Paramadina*, 145.
- Haris, Syamsuddin. (2014). "Pemilu 2014, Demokrasi dan Problem Kepemimpinan Urgensi Penataan Skema Pemilu untuk Efektifitas Sistem Presidensial". Paper disampaikan pada acara Seminar Nasional XXV AIPI "Indonesia dan Tantangan Politik Pasca Pemilu 2014. Jakarta, 19 Februari 2014
- Haryanto. (2014). Kebangkitan Party Id: Analisis Perilaku Memilih Dalam Politik Lokal Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 17, Nomor 3, Maret 2014
- Hastuti, S. (2004). Pemilu dan Demokrasi dalam Telaah Terhadap Prasyarat Normatif Pemilu. *Jurnal Hukum No 25 Vol. 11 Januari 2004*.
- Hayat. 2014. Korelasi Pemilu Serentak Dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial. *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014
- Hendra Ahmad. 2013. Implikasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif Dan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Secara Serentak Terhadap Ambang Batas Pencalonan Presiden (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 3 Volume 1 Tahun 2013.
- Hyde D. Susan, Marinov Nokolay, 2014. Information and Self-Enforcing Democracy: The Role of International Election Observation. *Journal International Organization / Volume 68 / Issue 02 / March 2014*, pp 329 - 359
- Herawati R, Sukma Novira R, Untung Dwi Hananto. 2018. Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018*, 829-846
- Lutfil Ansori, 2017, "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Dalam Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Yuridis*, Vol.4, No.1.
- Mark, P. Jones. (2015). Electoral Laws and the Effective Number of Candidates in Presidential Elections. *The Journal of Politics*, Vol. 61, No. 1 (Feb., 1999), pp. 171-184
- Mudhoffir Mughis A. 2013. Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Sosiologi Masyarakat* . Vol. 18, No. 1, Januari 2013: 75-100
- Mukhtarrija*, M., Handayani, I. g., & Riwanto, A. (2018). The Ideal Concept of Presidential Threshold Arrangement to Achieve Constitutional Rights of New Political Parties in a Simultaneous General Election In Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 90.
- Nas J. 2005. Demokrasi dan Demokratisasi: Konsep, Teori, dan Aplikasinya. *Wacana Indonesia*. Vol (1) No (1), Mei 2005

- Noor, F. (2013). Konsolidasi Parpol Menjelang Pemilu *Party Consolidation A Year Before Election. Jurnal Penelitian politik*. Volume 10 No. 1 Juni 2013.
- Nurdin. 2011. Konsep Keadilan Dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam Dan Barat. *Media Syariah*. Vol 8 (1) Januari – Juni 201
- Nurhasim. 2013. Kegagalan Modernisasi Partai Politik Di Era Reformasi. *Jurnal Penelitian Politik* . Volume 10 No. 1 Juni 2013. 17-28
- Olivier Baudron and Pierre Alain Fouque, D. P. (2001). Practical Multi-Candidate Election System. *Proceedings Of The Twentieth Annual ACM Symposium On Principle Of Distributed Computing*, 275 No. 1-58113-383-9
- Pardede, M. 2014. Implikasi Sistem Pemilihan Umum. *Jurnal Recht Vinding*.Vol (3) (1) 2014.
- Polamolo, S. (2016). Presidensialisme di Indonesia antara Amanah Konstitusi dan Kuasa Partai. *Konstitusi*, 323 Volume 13, Nomor 2, Juni.
- Powell Jr, Bingham. 1982. *Contemporary Democracies: Participation, Stability and Violence*. Massachusetts: Harvard University Press
- Qomariyah. 2014. Kesiapan Guru Dalam Menghadapi Implementasi Kurikulum 2013. *Jurnal Pendidikan Ekonomi IKIP Veteran Semarang*.Vol. 2 No. 1, November 2014
- Riwanto, A. (No. 4 Volume 21 oktober 2014). Inkompatibilitas Asas Pengaturan Sistem Pemilu dengan Sistem Pemerintahan Presidential di Indonesia. *Hukum IUS QUAI IUSTOM*, 510.
- Rully. 2018. Efektifitas Iklan Negatif Di Media Sosial Dalam Politik Di Indonesia. *Jurnal lontar* Vol. 6 No 1 Januari-Juni 2018, 69-79
- Ruitinga, V. (2011). Ideal Theory and Utopia. *Erasmus Student Journal of Philosophy*, 1(1), 48–54. Retrieved from <http://hdl.handle.net/1765/76977>
- Ruppert, Evelyn, and Mike Savage, 2011, "Transactional Politics." *The Sociological Review*, Volume 59, Nomor 2
- Setiadi, Wicipto. 2008. Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratis. *Jurnal Leglislasi Indonesia*. 5(1):29
- Sholihah, R. 2018. Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak Dalam Perspektif Politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol (3) (1), 2018 73-78
- Sholikin. Ahmad. 2015. Mahalnya Ongkos Politik Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Transformative*, Vol. 5, Nomor 1, Mei 2019
- Siahaan, M. 2009. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal hukum* No. 3 vol. 16 juli 2009: 357 – 378
- Simarmata, M. H. (2017). Mencari Solusi Terhadap Keraguan Sistem Pemilihan Umum yang Tepat di Indonesia. *Legislasi Indonesia*, 292 Vol. 14 No. 03 - September.

- Suparto, E. C. (2017). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalon Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum 2019. *UIR Law Review*,
- Suparto. (2016). Analysis Of Constitutional Court Verdict Number 14/PUU-XI/2013 On The Presidential Threshold. *Jurnal dinamika hukum*, Vol 16 Nomor 3, September 2016.
- Triono. (2017). Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Wacana Politik*, 156.
- Veri junaidi, K. a. (2013). *POLITIK HUKUM SISTEM PEMILU:Potre Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD*. Jakarta: Yayasan Perludem.
- Wahid, F. (2004). Metodologi Penelitian Sistem Informasi: Sebuah Gambaran Umum. *Media Informatika*, Vol. 2. No. 1, Juni 2004. 75-76.
- Wanda Zulfika A, 2018. *Logical Fallacy* Putusan Mahkamah Konstitusi Legitimasi *Status Quo* Melalui Presidential Threshold Pemilu Serentak 2019. *Justitia Jurnal Hukum*. Volume 2, No.2 Oktober 2018
ISSN Cetak: 2579-9983,E-ISSN: 2579-6380
- Warjiyati, S. 2018. Urgensi Presidential Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. Prosiding Nasional. Vol. 1 No 1 Tahun 2018.
- Wati, E. Purnama. 2015. Pemilu Sebagai Wujud Kedaulatan Rakyat. *E-jurnal Hukum*. Volume 8 Nomor II. Bulan Mei Tahun 2015
- Wells, Michael Lewis, 2015, "Constitutional Remedies: Reconciling Official Immunity with the Vindication of Rights," *Saint John's Law Review*.
- Wibowo, Mardian. 2015. "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian UU". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12 (2)
- Widaningsih. 2014. Implikasi Yuridis Atas Putusan Mahkamah Koinstitusi Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.19, No.1 Juni 2014, hlm. 93–105
- Wilson, Chris, 2015, "Illiberal Democracy And Violent Conflict In Contemporary Indonesia," *Democratization*, Volume 22, Nomor 7.
- Zainal Arifin Hoesein & Arifudin, (2017) *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok:Rajawali Pers.
- Zuhri, Sholehuddin N. A. (2017). Kekuasaan Partai Simple Majority Dalam Formulasi Kebijakan (Analisis Keputusan Politik Presidential Threshold Pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu). *International Journal of Government and Social Science*, 94 P-ISSN: 2476-9029

Sumber lain;

Artikel Ihsanuddin. Soal Presidential Threshold, Gerindra Anggap MK Hilang Kewarasan".<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/11/23070881/soal-presidential-threshold-gerindra-anggap-mk-hilang-kewarasan>. dikutip tanggal 10 Mei tahun 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. dikutip tanggal 5 Desember 2018.
<https://kbbi.web.id/debat>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/11/16080101/melihat-peta-politik-pilpres-2019-pascaputusan-mk-soal-presidential>.dikutip tanggal 13 Novembar tahun 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/12/10353081/yusril-putusan-mk-soal-presidential-threshold-tak-sejalan-dengan-spirit>.

----- Pelaksanaan Pemilu dalam negara demokrasi Lihat,
<http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=35&year=2006>. Diakses 3 Juli 2019.